

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Harga dan Komoditas Strategis

Perkembangan harga di Kabupaten Ciamis selama Triwulan II 2025 menunjukkan dinamika yang adaptif dan terkendali, seiring dengan kemampuan daerah merespons perubahan pasokan dan permintaan, termasuk faktor musiman pasca-HBKN Idul Fitri serta menjelang Idul Adha dan periode libur sekolah. Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencerminkan fluktuasi yang wajar, dengan kenaikan moderat pada April 2025 (0,58% pada Minggu II), deflasi pada Mei 2025 yang menandakan pasokan relatif melimpah, serta kembali menguat secara terbatas pada Juni 2025 (0,76% pada Minggu III). Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan pengelolaan inflasi pangan yang efektif dan terkoordinasi di Kabupaten Ciamis.

Grafik 1.

Sumber: BPS Jabar dan BPS Ciamis

Memasuki Triwulan II 2025, kinerja pengendalian harga semakin menguat, tercermin dari rata-rata IPH sebesar -0,58% yang menandakan tekanan harga yang semakin moderat. Pergerakan rerata IPH pada April (0,30%) dan Juni (0,59%) tetap berada dalam rentang yang terjaga, sementara deflasi pada Mei (-2,63%) mencerminkan pasokan pangan yang melimpah dan distribusi yang semakin efisien. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan keberhasilan sinergi penguatan produksi, kelancaran distribusi, dan efektivitas langkah stabilisasi harga, sehingga mendukung terjaganya stabilitas inflasi Kabupaten Ciamis secara berkelanjutan.

Dibandingkan dengan perkembangan inflasi Provinsi Jawa Barat yang secara umum tetap rendah dan terkendali (Average IPH Juni -0,36%), Kabupaten Ciamis menunjukkan dinamika harga yang sejalan. Pada saat Jawa Barat mencatat inflasi tahunan yang masih berada dalam rentang sasaran nasional serta mengalami deflasi bulanan pada Mei 2025 akibat melimpahnya pasokan pangan, IPH Kabupaten Ciamis juga menunjukkan pola serupa dengan deflasi pada Mei dan kenaikan yang terbatas pada April dan Juni. Pergerakan ini menegaskan bahwa fluktuasi harga di Ciamis terutama dipengaruhi oleh faktor musiman dan pasokan pangan lokal, sementara secara keseluruhan tetap mendukung posisi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Pulau Jawa, serta mencerminkan efektivitas pengendalian harga di tingkat daerah yang berjalan selaras dengan capaian regional.

Perkembangan harga komoditas pangan utama selama periode April-Juni 2025 menunjukkan dinamika yang terkelola dengan baik. Harga beras medium relatif stabil dan kembali ke harga normal pada akhir Juni 2025, mencerminkan terjaganya pasokan serta memberikan dukungan positif terhadap daya beli masyarakat. Bawang merah dan cabai merah mengalami penurunan harga yang signifikan di Mei 2025, sehingga menjadi komoditas yang mampu menahan

tekanan inflasi. Namun, kedua komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di Juni namun masih dalam taraf yang terkendali. Di sisi lain, harga komoditas daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras cenderung stabil tanpa fluktuasi ekstrem. Sementara itu, harga Minyakita dan Gula Pasir juga terpantau stabil dan masih berada pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Grafik 2. Perkembangan Harga Bawang Merah di Pasar Ciamis Manis

Sumber: Silinda Jabar

Grafik 3. Perkembangan Harga Cabai Merah di Pasar Ciamis Manis

Sumber: Silinda Jabar

Grafik 4. Perkembangan Harga Beras Medium di Pasar Ciamis Manis

Sumber: Silinda Jabar

Grafik 5. Perkembangan Telur Ayam di Pasar Ciamis Manis

Sumber: Silinda Jabar

Dinamika inflasi diperkirakan tetap dapat dikelola dengan baik melalui langkah antisipatif yang terukur. *Event* HBKN Idul Adha, peningkatan permintaan hewan qurban berpotensi mendorong pergerakan harga daging sapi, kambing, dan domba, namun kondisi ini dapat direspons melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi. Beberapa komoditas seperti cabai rawit dan rokok kretek filter diperkirakan masih memberikan tekanan inflasi, sementara telur ayam ras dan daging ayam ras berpotensi menjadi penahan inflasi seiring ketersediaan pasokan Ciamis yang terjaga. Selain itu, periode libur sekolah diperkirakan mendorong peningkatan mobilitas dan konsumsi, namun dengan koordinasi pengendalian harga yang solid, potensi lonjakan harga dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, cabai rawit tetap menjadi komoditas yang perlu dicermati, sementara bawang merah berpeluang berperan sebagai penyeimbang inflasi melalui pasokan yang relatif memadai.

Di samping dinamika permintaan musiman, perkembangan harga pangan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan struktural yang terus dicermati secara aktif. Fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan impor pada beberapa komoditas strategis mendorong pentingnya penguatan pasokan domestik. Perubahan iklim, termasuk prakiraan awal musim kemarau pada Mei 2025 dan periode pancaroba, menjadi momentum untuk memperkuat manajemen produksi tanaman pangan dan hortikultura seperti cabai, bawang, dan padi. Dari sisi distribusi, potensi keterlambatan pengiriman akibat penyesuaian kebijakan transportasi, keterbatasan infrastruktur jalan, serta peningkatan mobilitas pada libur panjang diantisipasi melalui penguatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, TPID terus meningkatkan pengawasan

pasar dan langkah preventif untuk meminimalkan potensi spekulasi dan penimbunan menjelang Idul Adha, sehingga stabilitas harga tetap terjaga

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Di Daerah

Pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis, sebagaimana di wilayah lain di Jawa Barat, berlangsung dalam konteks tantangan yang semakin kompleks, sekaligus membuka ruang penguatan tata kelola dan sinergi kebijakan. Dari aspek produksi dan pasokan pangan, dinamika musiman dan iklim menjadi faktor yang terus diantisipasi secara aktif. Ketergantungan sektor pertanian terhadap kondisi cuaca menjadikan perubahan musim, termasuk periode pancaroba dan awal musim kemarau, sebagai momentum untuk memperkuat manajemen produksi dan perencanaan pasokan. Meskipun neraca pangan Jawa Barat menunjukkan surplus pada sebagian besar komoditas, TPID Kabupaten Ciamis tetap mencermati potensi ketidakseimbangan pada komoditas tertentu, sehingga langkah antisipatif melalui penguatan produksi lokal, diversifikasi sumber pasokan, dan koordinasi antarwilayah dapat terus dioptimalkan guna menjaga ketersediaan pangan di pasar.

Dari sisi data, Kabupaten Ciamis telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui pelaporan harga harian yang relatif konsisten dan lengkap. Capaian ini menjadi modal penting dalam memperkuat sistem pemantauan inflasi daerah, sekaligus mendorong peningkatan integrasi data lintas daerah dan lintas sistem di tingkat regional. Penguatan interoperabilitas data ke depan diharapkan semakin mendukung pengambilan keputusan TPID yang lebih cepat, presisi, dan berbasis informasi real-time.

Selanjutnya, distribusi dan logistik yang belum optimal menjadi kendala krusial dalam menjaga stabilitas harga. Akses infrastruktur jalan yang masih terbatas, terutama di daerah perbatasan, seringkali menjadi hambatan utama dalam kelancaran distribusi komoditas pangan dan hewan qurban. Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat saat libur panjang dapat menyebabkan kemacetan parah, yang secara tidak langsung berdampak pada efisiensi dan kecepatan distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar konsumen. Isu-isu seperti pelarangan truk *Over Dimension Over Load* (ODOL) juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, mengancam pasokan komoditas utama seperti telur dan cabai ke wilayah-wilayah konsumen, termasuk Jakarta dan Jawa Barat.

Di samping tantangan struktural, perilaku pasar dan spekulasi juga turut memperkeruh kondisi inflasi. Kenaikan harga yang tidak wajar seringkali bukan semata-mata disebabkan oleh faktor pasokan dan permintaan murni, melainkan dipicu oleh praktik spekulasi dan penimbunan oleh oknum-oknum tertentu. Fenomena ini cenderung meningkat menjelang HBKN dan libur panjang, di mana permintaan konsumen melonjak. Lebih lanjut, ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap kenaikan harga dapat memicu perilaku *panic buying* atau pembelian berlebihan, yang justru memperburuk situasi dengan menciptakan permintaan artifisial dan mendorong harga semakin tinggi.

Secara keseluruhan, tantangan pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis dipandang tidak hanya sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai ruang penguatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi TPID yang solid, penguatan data, produksi, distribusi, dan komunikasi yang efektif, upaya pengendalian inflasi diharapkan dapat terus menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, serta mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Adapun *Top-3* Komoditas yang perlu menjadi perhatian, sbb:

1. Cabai Merah, harga Juni Pekan Terakhir Rp 70.000, sementara harga Mei Pekan Terakhir berada pada kisaran Rp 51.249.
2. Cabai Rawit, harga Juni Pekan Terakhir Rp 80.000, sementara harga Mei Pekan Terakhir berada pada kisaran Rp 57.143.
3. Bawang Merah, harga Juni Pekan Terakhir Rp 40.000, sementara harga Mei Pekan Terakhir berada pada kisaran Rp 38.000 dan akhir Maret berkisar 35.000.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi selama Triwulan II 2025:

1. Ketersediaan Pasokan

(Menjaga kecukupan produksi dan stok pangan)

- Koordinasi Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan BULOG dalam penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani.
- Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen sebagai langkah antisipatif terhadap potensi lonjakan harga.
- Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor, sejalan dengan Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
- Pemenuhan sebagian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023.

2. Keterjangkauan Harga

(Menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat)

- Intensifikasi kegiatan pasar murah guna memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan penyerapan komoditas pada produsen, khususnya daging ayam ras dan telur ayam ras.
- Pengawasan harga komoditas pangan strategis sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di pasar tradisional dan ritel modern, bekerja sama dengan Satgas Pangan.

3. Kelancaran Distribusi

(Memastikan distribusi pangan berjalan efisien dan merata)

- Pemantauan ketersediaan stok bahan pokok penting (bapokting) melalui aplikasi pemantauan harga serta sidak ke pasar dan distributor besar.
- Koordinasi antara Dinas Perdagangan Kabupaten Ciamis dan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam program dukungan distribusi oleh BUMN Pangan untuk komoditas Minyakita dan Hortikultura (Cabai dan Bawang Merah).
- Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya untuk menjaga kelancaran pasokan antarwilayah terutama komoditas Cabai dan Bawang Merah.

4. Komunikasi Efektif

(Membangun ekspektasi dan perilaku konsumsi yang bijak)

- Intensifikasi koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah.
- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsumsi bijak dan hemat energi, guna menjaga stabilitas permintaan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ketersediaan pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah

1. Capaian Positif:

- Inflasi Terkendali di Tingkat Provinsi: Inflasi tahunan menunjukkan keberhasilan menjaga inflasi dalam rentang target nasional, bahkan menjadi salah satu yang terendah di Pulau Jawa.
- Penurunan Harga Komoditas Tertentu: Penurunan harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras pasca-Lebaran menunjukkan efektivitas intervensi atau kondisi pasokan yang membaik.
- Stok Pangan Aman: Neraca pangan di kabupaten ciamis sebagian besar mengalami

surplus komoditas pangan, dan stok cadangan pangan per 20 Juni 2025 terpantau aman, mengindikasikan ketersediaan pasokan yang memadai secara umum.

- Sistem Pemantauan Harga: Kabupaten Ciamis secara konsisten melakukan input data harian yang rutin dan lengkap ke SILINDA JABAR, dan SP2KP Kemendag menunjukkan komitmen terhadap pemantauan harga yang baik.

2. Area Perbaikan:

- Akurasi dan Kelengkapan Data: Meskipun Ciamis baik, masalah absensi dan ketidaklengkapan data input harga di beberapa kabupaten/kota lain (misalnya Kab. Bekasi, Kab. Ciamis, Kab. Karawang, Kab. Tasikmalaya pada bulan Mei dan Juni) masih menjadi tantangan, yang dapat mengurangi akurasi analisis dan kecepatan respons di tingkat provinsi.
- Efektivitas Intervensi Pasar: Meskipun pasar murah dilaksanakan, dampaknya terhadap stabilisasi harga di tingkat konsumen perlu dievaluasi lebih mendalam, terutama untuk komoditas yang terus mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit dan gula pasir yang masih di atas HET/HAP.
- Antisipasi Dampak Iklim dan Gangguan Produksi: Meskipun ada koordinasi dengan BMKG, langkah mitigasi konkret terhadap potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim dan hama (wereng, tikus) perlu lebih diintensifkan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Efektivitas Satgas Pangan dalam mencegah spekulasi dan penimbunan, terutama menjelang Idul Adha dan libur sekolah, perlu terus ditingkatkan dengan penegakan hukum yang tegas.
- Manajemen Distribusi: Isu-isu seperti pelarangan truk ODOL dan kendala infrastruktur jalan menunjukkan perlunya strategi manajemen distribusi yang lebih adaptif dan tanggap.

3. Rekomendasi Kebijakan:

1. Pemantauan Ketersediaan Stok dan Harga:

- Terus melakukan pemantauan ketersediaan stok bahan pokok penting (bapokting) melalui data di aplikasi maupun sidak ke pasar dan distributor besar.
- Pengawasan harga komoditas pangan strategis sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pemerintah (HAP) di pasar tradisional maupun ritel modern, bekerjasama dengan Satgas Pangan setempat.

1. Intervensi Pasar:

- Mengintensifkan kegiatan pasar murah untuk memastikan masyarakat memperoleh harga pangan yang terjangkau serta membantu percepatan penyerapan komoditas pangan pada produsen, terutama daging ayam ras dan telur ayam ras yang harganya sedang turun.
- Dinas Perdagangan Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi terkait

program dukungan distribusi Minyakita oleh BUMN Pangan.

1. Peningkatan Produksi dan Pasokan:

- Pemda Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BULOG setempat dalam penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani.
- Melakukan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga.
- Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan impor sesuai Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

1. Pengelolaan Cadangan Pangan:

- Pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023.

1. Kerjasama Antar Daerah (KAD):

- Melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) bagi daerah defisit dengan daerah yang surplus.

1. Koordinasi dan Edukasi:

- Mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hemat energi dan konsumsi bijak.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Ciamis, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, dengan mengacu pada arahan Kementerian terkait dan praktik terbaik:

1. Ketersediaan Pasokan

(Menjaga kecukupan stok dan kesinambungan produksi pangan)

- Peningkatan Produksi Pangan Lokal: Mengintensifkan peningkatan produksi komoditas

pangan strategis yang rentan fluktuasi harga, seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi/ayam, melalui:

- Penyaluran subsidi benih unggul dan alat mesin pertanian (alsintan) yang tepat sasaran.
- Pengawasan distribusi pupuk secara intensif.
- Penguatan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan petani.
- Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD): Memastikan pemenuhan standar CPPD sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023, serta mengoptimalkannya sebagai instrumen stabilisasi saat terjadi gejolak harga.

2. Keterjangkauan Harga

(Menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat)

- Optimalisasi Operasi Pasar dan GPM: Pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara lebih terarah dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan:
- Lokasi strategis
- Komoditas prioritas (khususnya cabai rawit dan daging)
- Evaluasi dampak intervensi secara berkala
- Pengelolaan Administered Price: Pemerintah daerah menjaga stabilitas harga kelompok administered price (seperti LPG dan tarif air) dengan tidak melakukan penyesuaian harga pada periode HBKN dan momen rawan inflasi.

3. Kelancaran Distribusi

(Menjamin kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen)

- Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang Proaktif: TPID Kabupaten Ciamis secara aktif menjalin KAD dengan daerah surplus pangan, terutama menjelang HBKN Idul Adha dan libur sekolah, dengan perjanjian yang mencakup:
- Volume pasokan
- Harga
- Jadwal pengiriman yang jelas
- Manajemen Logistik dan Distribusi: Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan distribusi, termasuk:
- Koordinasi lintas instansi untuk kelancaran arus barang
- Antisipasi dampak kebijakan transportasi seperti pelarangan truk ODOL
- Peran BUMD dan BUMDes: Mengoptimalkan peran BUMD dan BUMDes dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di tingkat lokal.

4. Komunikasi Efektif

(Mengelola ekspektasi dan memperkuat kepercayaan publik)

- Pengawasan Harga dan Stok: Mengintensifkan pengawasan harga dan ketersediaan stok komoditas pangan strategis agar sesuai dengan HET dan HAP, baik di pasar tradisional

maupun ritel modern.

- Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar: Bersama Satgas Pangan, melakukan tindakan tegas terhadap praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan masyarakat.
- Mitigasi Risiko Berbasis Informasi Iklim: Memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh informasi cuaca dan iklim yang akurat sebagai dasar antisipasi gangguan produksi dan pasokan.
- Edukasi dan Sosialisasi Publik: Melakukan kampanye komunikasi kepada masyarakat mengenai konsumsi bijak dan pencegahan panic buying, khususnya menjelang HBKN dan libur sekolah.

5. Penguatan Pendukung Strategi 4K

(Enabler kelembagaan dan fiskal)

- Alokasi Anggaran BTT: Menjamin ketersediaan dan fleksibilitas Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD untuk intervensi pengendalian inflasi yang mendesak.
- Peningkatan Kapasitas TPID: Melanjutkan *capacity building* TPID, termasuk studi banding ke daerah dengan praktik pengendalian inflasi yang baik.

6. Peningkatan Akurasi dan Integrasi Data:

- Optimalisasi SILINDA JABAR: TPID Kabupaten Ciamis harus terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas input data harga pangan pokok strategis ke aplikasi SILINDA JABAR secara rutin, harian, dan lengkap, termasuk pada hari libur. Mendorong kabupaten/kota lain untuk mencapai standar yang sama.
- Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada petugas penginput data di pasar untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data.